

### **BAB III**

## **DINAMIKA PERDAGANGAN BILATERAL KOREA UTARA DENGAN TIONGKOK**

Bab ini akan membahas mengenai dinamika perdagangan bilateral antara Korea Utara dengan Tiongkok. Pembahasan akan diawali dengan menjelaskan Tiongkok sebagai salah satu negara yang berpengaruh bagi Korea Utara dimana Tiongkok merupakan rekan dagang utama Korea Utara dan upaya Tiongkok dalam mempertahankan rezim Korea Utara. Diantara banyaknya negara yang memiliki hubungan baik dengan Korea Utara, Tiongkok dianggap sebagai aliansi paling penting sepanjang sejarah dan eksistensi Korea Utara. Selain itu, akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi Tiongkok dan Korea Utara di dunia. Kemudian diakhiri dengan merenggangnya hubungan Korea Utara dengan Tiongkok pasca uji coba nuklir Korea Utara tahun 2013.

Hubungan yang terjalin antara Tiongkok dengan Korea Utara sampai saat ini juga masih erat. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa pihak yang menilai bahwa hubungan dekat antara Korea Utara dengan Tiongkok terdapat sedikit guncangan karena dukungan yang diberikan oleh Tiongkok terhadap sanksi atau resolusi PBB yang diberikan pada Korea Utara akibat dari uji coba nuklir yang dilakukannya, khususnya uji coba nuklir pada tahun 2013.

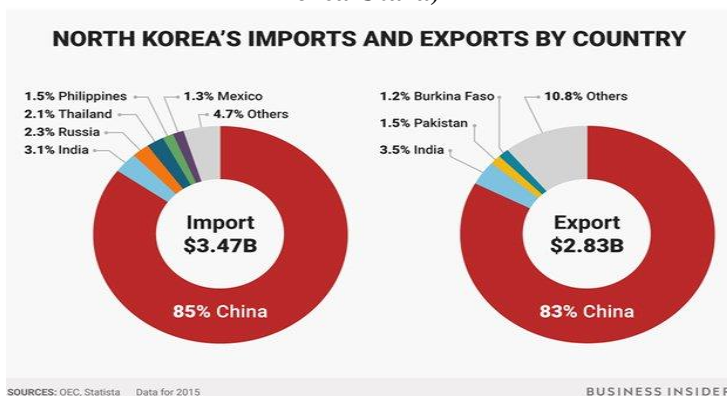
#### **A. Tiongkok Sebagai Salah Satu Negara Berpengaruh Di Korea Utara**

##### **1. Tiongkok Sebagai Rekan Dagang Utama Korea Utara**

Korea Utara memang dikenal sebagai negara yang miskin. Oleh karena itu, Korea Utara mendapat banyak bantuan dari Tiongkok dalam bidang perekonomian, khususnya perdagangan. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Badan Intelejen Pusat Amerika Serikat yang mencatat bahwa lebih dari 75% perdagangan Korea Utara adalah dengan Tiongkok

(Indonesia, 2017). Scott Synder yang merupakan Direktur Program pada kebijakan Amerika Serikat - Korea di Dewan Hubungan Luar Negeri, mengatakan bahwa Tiongkok memiliki pengaruh sangat besar dalam mempengaruhi stabilitas Korea Utara. Korea Utara juga mendapatkan bantuan seperti minyak dalam jumlah besar dan makanan tiap tahunnya dari Tiongkok. Jadi, dapat dikatakan bahwa Korea Utara bertahan hidup dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh Tiongkok. Meskipun Korea Utara merupakan negara kecil yang tidak banyak menguntungkan bagi Tiongkok, namun hubungan bilateral antara kedua negara tersebut tetap dipertahankan. Bahkan meskipun Korea Utara telah melakukan tindakan melanggar norma-norma internasional terkait nuklir, namun Tiongkok tidak pernah memutuskan hubungan bilateralnya ini (Yesaya Anggia, 2016).

**Gambar 3.1. (Grafik negara yang berdagang dengan Korea Utara)**



Sumber : <http://www.businessinsider.sg/north-korea-and-china-trade-2017-9?r=US&IR=T>, diakses pada tanggal 20 Desember 2017, pukul 21.05.

Seperti yang terlihat pada gambar, berdasarkan dari data *Observatory of Economic Complexity (OEC)* bahwa Tiongkok menduduki presentase paling banyak melakukan ekspor dan impor ke Korea Utara, dimana Tiongkok dengan presentase sebesar 85% untuk melakukan impor ke Korea Utara dan 83% ekspor yang dilakukan Korea Utara ke Tiongkok.

Dalam kegiatan perdagangan antar kedua negara tersebut, Beijing lebih banyak mengekspor batu bara dan mineral dari Pyongyang, menyuplai makanan dan bahan bakar yang krusial untuk penduduk Korea Utara (Vaswani, 2017). Hal inilah salah satu penyebab kenapa Korea Utara tidak dapat melepaskan kerjasama dengan Tiongkok. Selain itu, Tiongkok yang saat ini dikenal sebagai kekuatan ekonomi baru dimana apabila terdapat sesuatu yang akan mempengaruhi Tiongkok maka mungkin juga akan mempengaruhi dunia internasional.

## **2. Keiktsertaan Tiongkok Dalam Menjaga Stabilitas Rezim Komunis Korea Utara**

Korea Utara dikenal sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi rezimnya yaitu rezim komunis. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, komunisme adalah sebuah ideologi yang menghendaki penghapusan pranata kaum kapitalis serta berkeinginan membentuk masyarakat kolektif agar tanah dan modal yang dimiliki secara sosial dan pertentangan kelas serta sifat kekuatan menindas dari negara tidak berlangsung lagi. Disisi lain, Tiongkok juga memiliki rezim yang sama dengan Korea Utara dan hal inilah yang membuat Korea Utara dan Tiongkok memiliki kepentingan yang sama yaitu ingin tetap mempertahankan ideologinya tersebut. Kedua negara tersebut juga menyadari adanya ancaman terhadap rezim komunis di negara masing-masing.

Sebagai negara yang sama-sama berideologi komunis, Tiongkok dan Korea Utara saling menyadari arti pentingnya masing-masing. Peristiwa runtuhnya Uni

Soviet pada 1991, menyisakan Tiongkok dan Korea Utara sebagai rekan ideologis yang masih tersisa dan berkepentingan di Asia Timur. Keyakinan Tiongkok bahwa jika makin banyak rezim komunis yang jatuh, maka akan semakin sulit pula bagi Tiongkok untuk mengukuhkan legitimasinya, membuat Tiongkok mempertahankan Korea Utara sebagai sekutu terdekatnya. Tiongkok mengambil peran Uni Soviet dalam mendukung kestabilan berdirinya Korea Utara.

Adanya ancaman terhadap rezim komunis ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Tiongkok karena, Korea Utara yang selalu diberi kecaman dan ancaman dari dunia internasional akibat uji coba nuklir yang dilakukannya. Pasalnya, untuk dapat mempertahankan legitimasinya, Tiongkok harus menopang rezim komunis yang ada di Korea Utara, karena apabila semakin banyak rezim komunis yang jatuh, maka akan semakin sulit bagi Tiongkok untuk mengukuhkan legitimasinya (Sudirman, 2016).

Selain dapat mempersulit penguatan legitimasi Tiongkok, apabila rezim Korea Utara runtuh maka akan membahayakan keamanan nasional Tiongkok dan mengganggu pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap permasalahan ledakan penduduk yang ditimbulkan dari pengungsi Korea Utara yang datang ke Tiongkok. Pada level Internasional, runtuhnya Korea Utara akan membuat komunitas internasional memiliki keraguan atas sistem sosialis, yang dianut kedua negara. Melalui kesamaan pandangan atau ideologi yaitu sistem sosialis, maka Tiongkok menginginkan Korea Utara untuk dapat menjadi bagian dari komunitas internasional, dengan merubah sikapnya seperti Tiongkok. Tiongkok menginginkan agar Korea Utara dapat diterima di dunia internasional, namun masih dengan wajah yang sama sebagai negara sosialis. Jika Korea Utara runtuh, kemungkinan yang akan terjadi adalah bergesernya

paham sosialis menjadi demokratis(Yesaya Anggia, 2016).

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Tiongkok untuk mempertahankan rezim Korea Utara adalah pada saat Tiongkok memberikan sanksi yang lebih keras terhadap Korea Utara karena pendekatan kooperatif dianggap tidak lagi mampu meyakinkan Korea Utara untuk berhenti melakukan provokasi nuklir. Dimana pada saat Tiongkok menyetujui pemberian sanksi yang lebih keras terhadap Korea Utara dalam kasus uji coba nuklir tersebut, namun prinsip non – intervensi dan penyelesaian konflik secara damai masih memberikan pengaruh terhadap sikap Tiongkok. Tiongkok menekankan pada pemberian sanksi yang menjamin adanya insentif untuk melakukan negosiasi dan dialog dalam menyelesaikan isu denuklirisasi.

Bagi Tiongkok pemberian sanksi bukanlah instrumen utama yang digunakan untuk memaksa Korea Utara melakukan denuklirisasi, namun denuklirisasi hanya bisa dicapai melalui negosiasi dan konsultasi. Selanjutnya Tiongkok juga menekankan bahwa sanksi yang diberikan harus secara langsung membidik pengembangan program nuklir, dan menjamin agar keberlangsungan rezim pemerintahan Pyongyang dan keselamatan masyarakat sipil tidak terganggu akibat sanksi tersebut(Mahrta, 2016).

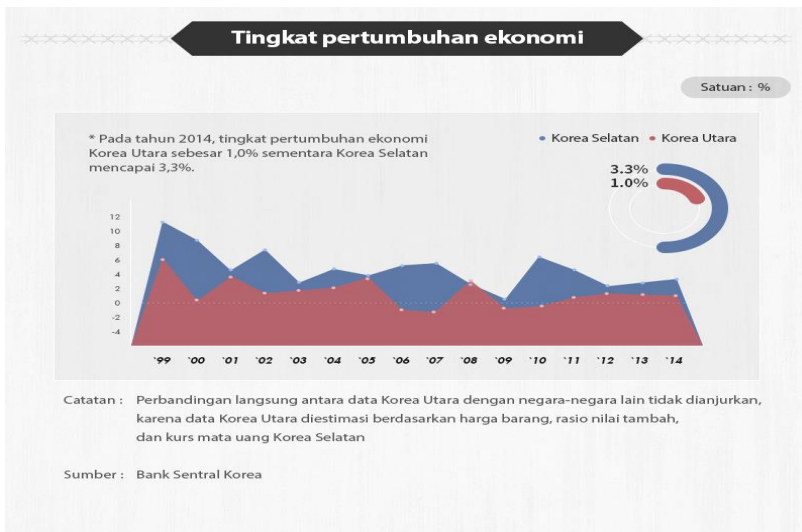
## **B. Perkembangan Ekonomi Korea Utara**

Sejak terpecahnya Korea Utara dengan Korea Selatan, Korea Utara berubah menjadi sebuah negara yang sangat tertutup, sehingga komunikasi antara Korea Utara dan dunia luar terutama Korea Selatan sangat minim dan dikontrol dengan ketat. Usaha-usaha untuk meredakan ketegangan atau konflik kedua Negara tetap dilakukan mengingat posisi Korea Utara semakin terkucilkan dalam pergaulan internasional akibat pandangan negatif dunia internasional sejak Korea Utara mulai melakukan program nuklirnya yang diteruskan

dengan pengembangan kemampuan rudal dengan serangkaian uji coba serta memburuknya situasi politik dan ekonomi Korea Utara pada saat itu.

Sebelumnya pada saat masa kepemimpinan Kim Jong Il, selama dua dasawarsa, kekuatan ekonomi Korea Utara lebih unggul dibandingkan Korea Selatan. Hal ini disebabkan banyaknya sumber alam pertambangan yang ada di Korea Utara. Namun setelah terpilihnya Park Chung Hee, Korea Selatan mencapai kesuksesan dalam pembangunan ekonomi. Korea Utara tidak mau mengakui berkembangannya ekonomi Korea Selatan (Widyasari, 2012).

### Grafik 3.2 (Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Korea Utara dengan Korea Selatan)



Sumber:

<http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/infographic/exchange.htm?lang=i>, diakses pada 29 Maret 2018, pukul 23.30 WIB.

Kemerosotan Korea Utara terjadi sejak tahun 1990-an dengan adanya pemutusan hubungan kerjasama bilateral dengan mitra dagang utamanya, yaitu USSR serta munculnya

pengaruh dari Eropa Timur yang mengkombinasikan peristiwa kelaparan akibat dari terjadinya peristiwa bencana banjir yang terjadi secara berturut-turut pada tahun 1996, 1997, dan 2000 di Korea Utara (Zuhri, 2010, hal. 2). Korea Utara mengalami kekurangan di berbagai bidang seperti bahan pangan, energi, bahan baku industri, mata uang asing, hingga kebutuhan pokok sehari-hari (Joon, 2000). Oleh karena itu, pada masa kepemimpinan Kim Jong Il menggunakan militer sebagai instrument penting dalam menjaga integritas dan kemonolitan Korea Utara sejak negeri ini berdiri. Bahkan hampir 25 % dari Gross National Product (GDP) Korea Utara dihabiskan untuk personel dan persenjataan. Padahal lima persen saja (sekitar 300 juta dollar) dari jumlah itu bisa digunakan untuk membeli 1,9 juta ton untuk memnuhi kekurangan pangan tiap tahunnya.

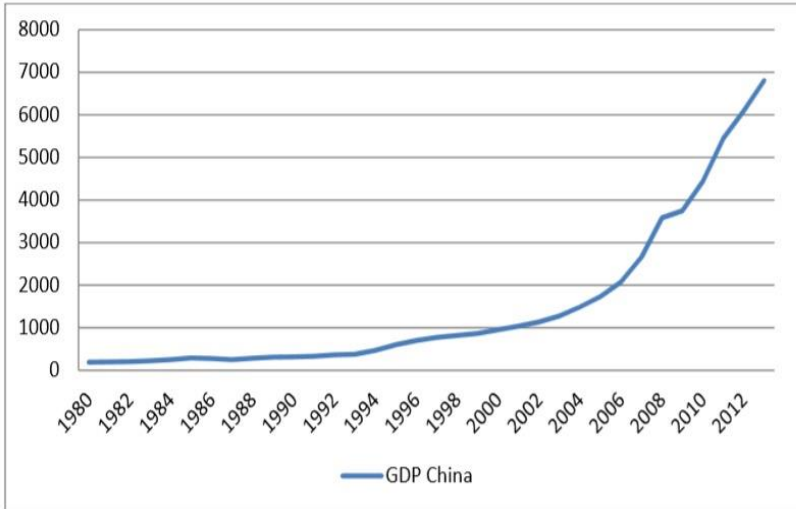
Hal ini ditambah dengan kondisi saat ini dimana setelah Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya dan terus mengembangkan energi nuklirnya, banyak perusahaan-perusahaan asing yang mencabut investasinya yang ada di Korea Utara. Selain itu, banyak negara – negara luar yang mencoba untuk menghentikan perdagangannya dengan Korea Utara. Tidak dipungkiri lagi bahwa Korea Utara merupakan salah satu negara miskin didunia. Selain itu akibat dari adanya uji coba nuklir tersebut, banyak diplomat Korea Utara yang diusir dari negara-negara luar maupun mengurangi hubungan diplomatiknya dengan Korea Utara seperti Spanyol, Peru, Meksiko, Mesir, dan lain lain (Essra, 2017).

### **C. Perkembangan Ekonomi Tiongkok**

Perkembangan ekonomi China yang begitu cepat dalam rentang waktu 30 tahun sering dituliskan para analis sebagai salah satu kisah sukses pembangunan ekonomi pada masa modern. Sejak tahun 1978 (ketika reformasi kebudayaan mulai dilakukan) hingga tahun 2008, GDP China rata-rata meningkat 10% setiap tahunnya. Dari tahun 1980 hingga 2008, perekonomian China tumbuh 14 kali. China kini merupakan negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia. Para

peneliti bahkan memprediksi bahwa China akan menjadi yang terbesar dalam beberapa dekade mendatang (Linda, 2010).

### **Grafik 3.2 Pergerakan GDP China Periode tahun 1980-2012**



*Sumber : National Bureau of Statistic of China*

Pada tahun 1980 perekonomian China menggunakan sistem perekonomian terbuka dan menjadikan China sebagai negara yang tingkat pertumbuhannya tertinggi di dunia. Sejak sistem perekonomian China berubah menjadi sistem perekonomian terbuka pada tahun 1980, China mengalami pertumbuhan yang pesat yang terlihat pada gambar di atas. Pada tahun 2005 China terus mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan total GDP sebesar USD 1.731,13 miliar. Hal ini menjadikan China sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia sebesar 11,4% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 10,1% dengan total GDP sebesar USD 1.490,38 miliar



Perdagangan dan investasi asing memainkan peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi negeri yang begitu signifikan. Ellen L. Frost dalam artikel “Promise or Threat? China’s Commercial Diplomacy in Asia” mencatat di akhir tahun 1990, total Foreign Direct Investment (FDI) yang masuk ke China adalah yang ketiga terbesar dari total FDI di seluruh negara-negara berkembang. Tercatat sebesar 2,7 persen dari total 9,7 persen rata-rata GDP China berasal dari FDI. Pada tahun 2003, total FDI yang masuk ke China adalah sebesar US\$54 miliar, jauh mengungguli AS yang hanya mencatat sebesar US\$40 miliar. Sebanyak 23.500.000 lapangan pekerjaan tercipta dari sektor ini dan lebih dari 20,7 persen total pajak negeri berasal dari perusahaan investasi asing yang berada di China pada tahun 2005. Pada tahun 2004, total dari nilai perdagangan produk-produk China meningkat dua kali lipat dan menjadikan China sebagai negara kedua eksportir terbesar dan importir ketiga terbesar di dunia (Linda, 2010).

Lebih dari setengah volume perdagangan dilakukan oleh badan-badan investasi asing. Sepanjang tahun 2006 sendiri, sebanyak 594,445 perusahaan investasi asing terdaftar dengan lebih dari 480 perusahaan multinasional teratas dunia memasuki negara tersebut. Pada tahun 2008 total FDI yang masuk ke negara tersebut sebesar US\$ 92 milyar. China kini tercatat sebagai negara tujuan FDI terbesar ketiga di dunia (Linda, 2010).

#### **D. Perubahan Sikap Tiongkok Terhadap Korea Utara Tiongkok**

##### **1. Peran Aktif Tiongkok Dalam Resolusi DK PBB No. 2094 Untuk Menentang Uji Coba Nuklir Korea Utara**

Seiring dengan berkembangnya zaman, Korea Utara semakin membuat dunia Internasional terancam. Peralnya, dari tahun ke tahun, Korea Utara masih saja tetap berusaha untuk melakukan pengembangan terhadap energi nuklir yang dimilikinya terlebih lagi

bahwa Korea Utara semakin menunjukkan sikap tidak peduli terhadap Tiongkok yang mencoba untuk menghentikan uji coba nuklir Korea Utara tersebut.

Meskipun pada awalnya Tiongkok masih memberikan keringanan dan pembelaan terhadap uji coba nuklir yang pernah dilakukan oleh Korea Utara sebelumnya yaitu pada tahun 2006 dan 2009, akan tetapi hal ini berbeda pada saat Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya yang ketiga pada tahun 2013. Uji coba nuklir tahun 2013 ini dinilai sebagai uji coba terdahsyat yang pernah dilakukan apabila dibandingkan dengan uji coba sebelumnya. Sejumlah pakar meyakini uji coba yang dilakukan tersebut kemungkinan menggunakan bom uranium, bukan bom plutonium yang pernah di ledakkan Korea Utara dalam dua uji coba sebelumnya. Korea Utara hanya sukses mengujicobakan satu peluru kendali jarak menengah ,Rodong-1, yang berjangkauan 1.300 km. Berdasarkan temuan – temuan dari Dinas Intelijen militer Amerika Serikat, menunjukkan bahwa Korea Utara memiliki kemampuan meluncurkan peluru kendali berhulu ledak nuklir (Winata, 2014).

Tiongkok merasa bahwa dengan adanya uji coba nuklir Korea Utara tahun 2013 tersebut merupakan sumber ancaman bagi stabilitas kawasan regional Asia Timur terlebih lagi karena Korea Utara semakin melakukan perlawanan apabila mendapat kecaman untuk segera menghentikan program nuklirnya tersebut. Oleh karena itu, Tiongkok merasa harus mengambil langkah tegas terhadap Korea Utara melalui peran aktifnya dalam merancang butir sanksi Resolusi DK PBB nomor 2094.

Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok yang menuturkan bahwa pihaknya akan secara ketat menerapkan resolusi DK PBB 2094, dan akan menyelidiki apakah ada kegiatan yang bertentangan dengan resolusi. Selain itu,

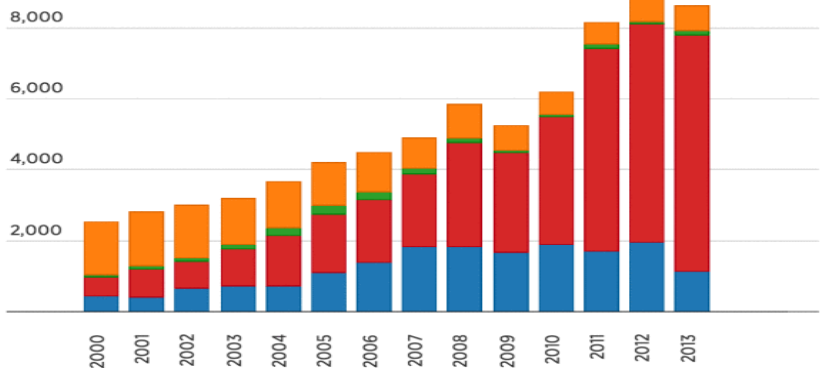
dikesempatkan yang sama, Beijing juga menuturkan, bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah di Semenanjung Korea adalah melalui jalur diplomatik, dan Tiongkok akan mendukung setiap pembicaraan damai yang digelar untuk menyelesaikan masalah tersebut (Maulana, 2017). Tiongkok sendiri sudah menjadi anggota Dewan Keamanan PBB pada 24 Oktober 1945 yang termasuk dalam grup regional Asia Pasifik sebagai salah satu dari lima anggota tetap DK PBB.

### Grafik 3.3 Perdagangan Korea Utara (Impor dan Ekspor)

#### North Korea total trade (imports + exports)

Total trade figures include trade with South Korea and Russia. \* Amounts in \$(mil)

■ South Korea ■ China ■ Russia ■ Rest of World



Source: North Korea: Witness to Transformation

CNBC

Sumber : <http://dish.andrewsullivan.com/2014/12/19/what-can-we-do-to-north-korea/>, diakses pada 30 Maret 2018, pukul 10.25 WIB.

Seperti yang terlihat pada grafik 3.3 bahwa setelah terjadinya uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara pada tahun 2013 mempengaruhi

perdagangan bilateral yang dilakukan Korea Utara dengan negara-negara luar khususnya Tiongkok. Tingkat perdagangan Korea Utara dengan Tiongkok menurun pada tahun 2013, dimana sebelumnya tingkat perdagangan antara Korea Utara dengan Tiongkok mengalami kenaikan dari tahun 2009-2012. Meskipun pada tahun 2009 Korea Utara baru saja melakukan uji coba nuklirnya yang ke-2, akan tetapi Tiongkok belum merasa bahwa uji coba tersebut mengancam keamanan nasional negaranya sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi perdagangan yang dilakukan antara Korea Utara dengan Tiongkok.

Selain itu, dengan aktifnya Tiongkok dalam Resolusi DK PBB No. 2094 ini juga membuat hubungan Korea Utara dengan Tiongkok semakin menjauh karena selama ini, meskipun Tiongkok merupakan salah satu anggota tetap dari DK PBB, akan tetapi dalam menanggapi resolusi DK PBB sebelumnya yaitu resolusi 1718 dan 1874, Tiongkok terkesan diam dan cenderung membela Korea Utara. Hal ini membuat kekecewaan besar Korea Utara terhadap Tiongkok ketika Tiongkok mulai berperan aktif dalam resolusi DK PBB No. 2094.

**Gambar 3.2 (Daftar negara anggota Dewan Keamanan PBB tahun 2013-2014)**



Sumber : [http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2012-10/20/content\\_15833442.htm](http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2012-10/20/content_15833442.htm), diakses pada tanggal 26 Januari 2018 pukul 22.30 WIB.

Resolusi 2094 ini juga memberikan prospek untuk mendorong Korea Utara kembali ke meja diplomasi Six Party Talks. Aturan ini terdapat dalam naskah resolusi DK PBB 2094: ***“Reaffirms its support to the Six-Party Talks, calls for their resumption, urges all the participants to intensify their efforts on the full and expeditious implementation of the 19 September 2005 Joint Statement”***. Adanya jaminan untuk menyelesaikan masalah melalui dialog dan konsultasi ini telah menjadi prinsip dasar bagi Tiongkok ketika dihadapkan pada pilihan untuk memberikan sanksi (Mahrita, 2016).

Tiongkok memilih aktif berkontribusi dalam forum DK PBB dengan berinisiatif untuk berkolaborasi dengan Amerika Serikat merancang sanksi yang lebih ketat melalui Resolusi 2094. Tidak hanya inisiatif untuk merancang, tetapi Tiongkok juga turut menerapkan serangkaian kebijakan sesuai dengan Resolusi 2094 DK PBB yang secara khusus. Berikut merupakan penerapan sanksi yang sudah dilakukan oleh Tiongkok kepada Korea Utara sesuai dengan Resolusi DK PBB 2094. Dalam merancang resolusi DK PBB No. 2094 ini, Amerika Serikat berusaha keras untuk menekankan kerjasama dengan Tiongkok dalam menyusun draf, bahkan memperkenalkan rancangan resolusi tersebut seperti yang disetujui oleh Amerika-Tiongkok, yang sangat berbeda dengan beberapa revisi Tiongkok terhadap draf awal resolusi sanksi seperti yang diajukan oleh Amerika Serikat pada tahun 2006.

**Tabel 3.1 Realisasi Penerapan Sanksi Tiongkok terhadap Korea Utara sesuai dengan Resolusi DK PBB 2094**

Kontrol arus pertukaran manusia	Pembatasan pemberian visa bagi pekerja asal Korea Utara sejak Februari 2014. Pembatasan ini secara langsung berdampak buruk bagi 12,17 juta pekerja asal Korea Utara yang siap bekerja di Tiongkok.
Kontrol pasukan ekspor minyak	Menghentikan aliran minyak mentah pada periode 6 bulan pertama di tahun 2014.

Sumber : Strait Times, 2013; New York Times, 2013; Liou, 2014; The Hankyoreh, 2014

Selain itu, dukungan yang diberikan Tiongkok terhadap resolusi DK PBB No. 2094 adalah: (1) Tiongkok memanggil duta besar Korea Utara dan menyerukan pembicaraan mengenai denuklirisasi; (2) Tiongkok menerapkan sanksi Resolusi 2094 dengan tidak mengekspor barang mewah seperti perhiasan (emas dan permata), Tiongkok hanya mengekspor perak, perhiasan imitasi dan lukisan yang jumlahnya tidak lebih dari US\$ 322 ribu; (3) Tiongkok melakukan embargo minyak mentah terhadap Korea Utara tahun 2014(Isnaeni, 2017).

Terkait dengan resolusi DK PBB No. 2094 ini, Korea Utara meresponnya dengan menghentikan segala kegiatan industri di Kaesong dan mengancam akan melakukan serangan serta akan menggunakan senjata nuklir serta akan mengaktifkan kembali reaktor nuklirnya dan menginstruksikan siaga perang kepada pasukan unit-unit artileri dan pasukan rudal strategisnya yang menekankan kesiapan pasukan Korea Utara untuk

menyerang Amerika Serikat dengan retribusi program perang nuklir dan perang biokimia. Korea Utara juga menyatakan akan menampilkan kesiapan militer dan tekad rakyatnya dalam menjaga kedaulatan serta kehormatan tingkat tinggi negara tersebut dalam aksiaksi militer(Winata, 2014).

## **2. Memberlakukan Sanksi Dagang terhadap Korea Utara**

Dalam menanggapi uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara khususnya uji coba nuklir yang dilakukan pada tahun 2013, Tiongkok mulai untuk menerapkan sejumlah sanksi dagang terhadap Korea Utara dalam wujud pembatasan pasokan bahan bakar minyak dan penghentian pembelian tekstil. Adapun pembatasan gas alam cair langsung diterapkan. Sanksi Tiongkok ditengarai akan semakin membuat perekonomian Korea Utara menurun, karena dalam waktu yang sama Korea Utara juga mendapatkan sanksi – sanksi yang berasal dari negara Barat. Meskipun awalnya Tiongkok dan Rusia menolak usulan Amerika Serikat untuk menghentikan ekspor minyak ke Korea Utara, namun pada akhirnya kedua negara tersebut sepakat untuk membatasinya (Indonesia, 2017).

Dalam sanksinya tersebut, Tiongkok juga mengontrol perdagangan di perbatasan Tiongkok – Korea Utara, seperti penutupan rekening perdagangan luar negeri Bank Korea Utara dan menghentikan transaksi keuangan terkait dengan pengembangan nuklir dan rudal oleh Bank of China, China Construction Bank, dan Bank BUMN lainnya; Menerapkan mekanisme pemeriksaan kargo dari dan menuju Korea Utara; dan Menerbitkan dokumen sebanyak 236 halaman yang berisi daftar produk dan teknologi yang dilarang untuk diekspor ke Korea Utara pada September 2013. Pemberlakuan sanksi dagang ini dilakukan supaya dapat menekan perekonomian Korea Utara.

Berikut beberapa tindakan tambahan yang dilakukan oleh Tiongkok supaya dapat menekan perekonomian Korea Utara :

**a) Energi**

Di era kepemimpinan Kim Jong Un ini, Korea Utara sangat bergantung pada produksi dan ekspor batu bara yang mana sebagian besar dari produksi tersebut akan diekspor ke Tiongkok. Ekspor batu bara tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi Korea Utara. Pada Februari 2017, penghasilan dari ekspor Korea Utara menimbulkan keraguan lantaran Tiongkok yang menyatakan untuk menghentikan impor batu bara dari Korea Utara di sisa akhir tahun 2017. Berdasarkan data dari pemerintah Tiongkok, impor batu bara dari Korea Utara turun sebanyak 75 persen pada awal tahun 2017.

**b) Perbankan**

Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya telah coba menekan pasokan uang dari pemerintah Korea Utara. Selain itu, memotong akses Korea Utara ke sistem bank global. Akan tetapi, Amerika selama bertahun-tahun menolak kebijakan dari bank yang berasal dari Tiongkok karena dianggap melakukan bisnis dengan Korea Utara. Kemudian, kebijakan ini berubah ketika Departemen Keuangan memblokir salah satu bank di Tiongkok dengan dugaan ada hubungan keuangan secara gelap dengan Pyongyang lantaran mengakses sistem perbankan Amerika. Selain itu, pejabat Amerika juga tidak mengesampingkan kemungkinan bank lain dapat menghadapi tekanan serupa dari Amerika dan mitra internasional lainnya. Tujuannya adalah untuk menolak akses Korea Utara ke bank global dan mencegah mengakses uang yang akan digunakan untuk program nuklirnya. Beijing bisa



mengarahkan regulator untuk denda dan sanksi lain yang masih melakukan bisnis dengan Pyongyang.

**c) Dana Tunai**

Korea Utara diperkirakan telah mengumpulkan uang yang besar dari penjualan batu bara ke Tiongkok. Direktur Korea Working Group di Harvard Kennedy School, John Park menuturkan, kalau Pyongyang telah mempertahankan jumlah yang sangat besar di Tiongkok untuk membeli apa yang diinginkan bagi program senjatanya. Membatasi akses Pyongyang terhadap sumber keuangan juga kembali lagi kepada kemauan politik dari pemerintah Tiongkok untuk menggunakan hukum domestik melacak dana tersebut.

**d) Buruh**

Korea Utara merupakan termasuk negara miskin. Oleh karena itu, salah satu cara untuk dapat membantu menutupi kemiskinan yang ada di negara tersebut adalah dengan mengirim ribuan pekerja Korea Utara ke luar negeri untuk bekerja keras di bawah kondisi kerja paksa yakni Tiongkok, Rusia dan Timur Tengah. Para pekerja tersebut bekerja di industri tambang, penebangan kayu, tekstil dan konstruksi. Pemerintah Korea Utara pun meraup upah mereka. Praktik tersebut dijalankan di Kota Dandong, Tiongkok. Pemerintah daerah menyatakan dalam website pemerintahan bahwa 20% dari 50 ribu pekerja di industri garmen yang berada di Dandong berasal dari Korea Utara. Mereka bekerja selama 12-14 jam dan dibayar gaji bulanan sekitar US\$ 260 (Melani, 2017). Karena Tiongkok merupakan rekan dagang utama Korea Utara dan hampir seluruh kebutuhan pokok yang ada di Korea Utara berasal dari Tiongkok, oleh karena itu

dengan menekan perekonomian Korea Utara, diharapkan dapat membuat Korea Utara menghentikan uji coba nuklirnya tersebut. Hal ini juga dilakukan karena peringatan yang diberikan oleh DK PBB dan dunia internasional untuk Korea Utara sama sekali tidak dianggap dengan serius oleh Korea Utara dan Korea Utara tetap melakukan uji coba nuklir tersebut.